

RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR



TAHUN 2025–2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,
NOMOR HK.02.02.19C.12.25.84 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR
TAHUN 2025-2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025-2029
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawa Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu rencana Startegis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2025-2029
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM Tanimbar untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. Acuan bagi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. Dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



ANTON DWI NURCAHYO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Isu Permasalahan	21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	31
2.1 Visi	31
2.2 Misi	32
2.3 Tujuan BPOM	34
2.4 Sasaran Kegiatan	36
2.5 METODE PENGUKURAN	21
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	47
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	47
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar .	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	56
4.1 Target Kinerja	56
4.2 Kerangka Pendanaan	58
BAB V PENUTUP	60
LAMPIRAN 1.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil Pegawai Loka POM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 4

Tabel 1.2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Utama (IKU) Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020-2024 6

Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT 30

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029..... 35

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Startegis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2025-2029 40

Tabel 2.3 Indikator Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar 43

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029..... 49

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025-2029 52

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 56

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 Berdasarkan Program..... 59

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 3

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya 3

Gambar 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM Kab.Kepulauan Tanimbar Tahun 2025
..... 4

Gambar 1.4 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kelompok Gender dan Usia 5

Gambar 1.5 Nilai Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020-2024 12

Gambar1.6 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat 20

Gambar 1.7 Platform Lynk.id Loka POM Tanimabar 25

Gambar 2.1 Misi Presiden 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memainkan peranan penting dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia memenuhi khasiat, manfaat, dan mutu yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, BPOM memiliki tanggung jawab strategis yang mendukung sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui evaluasi ketat terkait keamanan, mutu, dan efikasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut, BPOM diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap obat, makanan, dan produk terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Produk-produk yang diawasi meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Semua produk ini harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di dua kabupaten yang menjadi wilayah cakupan pengawasan, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi obat dan makanan.
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan.
7. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan

- peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
8. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber.
 9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
 10. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.
 11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.
 12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kontribusi BPOM dalam bidang kesehatan publik sangat signifikan. Pengawasan yang ketat terhadap produk berbahaya membantu mencegah peredaran produk yang tidak aman dan memastikan masyarakat dapat mengakses produk yang berkualitas. Dampaknya langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta pengurangan risiko kesehatan dari konsumsi produk yang tidak memenuhi standar sangat terasa.

BPOM beroperasi dalam lingkungan yang terus berubah dan berkembang, dengan tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya pertumbuhan industri obat dan makanan. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus memperbarui dan meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Oleh karena itu, pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 menjadi sangat penting.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode yang sama. Renstra Loka POM ini mengacu pada Renstra BPOM dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Loka POM di daerah ini menghadapi tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan, mengingat wilayahnya yang terdiri dari dua kabupaten yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan.

Pengembangan Renstra Loka POM untuk periode 2025-2029 merupakan respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra ini tidak hanya dirancang untuk mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan di masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memastikan bahwa Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, dengan mempertimbangkan inovasi dan dinamika sektor ini.

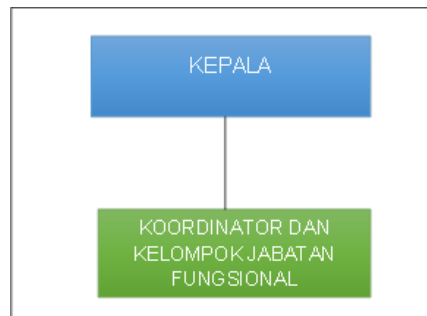
Dengan adanya Renstra periode 2025-2029, BPOM dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertekad untuk melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan publik dengan lebih baik. Melalui implementasi strategi yang terarah, kedua lembaga ini akan memastikan masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, tetap

memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.1.1 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipimpin oleh Kepala Loka yang langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

1.1.2 Wilayah Kerja

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.



Gambar 1.2 Peta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

1. Luas Wilayah Kerja

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu 52.995,20 km² yang terdiri dari wilayah perairan seluas ± 42.892,28 km² (80,94%) dan wilayah daratan hanya seluas

10.102,92 km² (19,06%). Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan daerah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 81 pulau. Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 berdasarkan BPS Kab. Kepulauan Tanimbar dalam 2024 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Angka sebanyak 131.370 jiwa.

Luas Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu 72.426,58 km² yang terdiri dari wilayah laut seluas ± 63.793,43 km² (88,08%) dan wilayah daratan hanya seluas 8.633,15 km² (11,92%). Kabupaten Maluku Barat Daya juga merupakan daerah kepulauan jumlah pulau sebanyak 48 pulau termasuk pulau-pulau yang tidak didiami. Jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan BPS Kab. Maluku Barat Daya dalam Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Angka 2024 sebanyak 93.766 jiwa.

2. Jumlah Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten yang menjadi wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar adalah 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan ibukota Saumlaki dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ibukota Tiakur.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki 10 Kecamatan yang terdiri dari: Tanimbar Selatan, Wertamrian, Wermaktian, Selaru, Tanimbar Utara, Yaru, Wuarlabor, Nirunmas, Kormomolin, Molu Maru. Adapun total jumlah desa pada 10 kecamatan di Kab. Kepulauan Tanimbar pada tahun 2024 sebanyak 89 desa/kelurahan. Sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki 17 Kecamatan kebanyakan terdiri dari Pulau-pulau kecil meliputi Wetar, Wetar Barat, Wetar Utara, Wetar Timur, PP. Terselatan, Kisar Utara, Kepulauan Romang, Letti, Moa Lakor, Lakor, Damer, Mdon Hyera, PP. Babar, Pulau Wetang, Babar Timur, Pulau Masela, Dawelloor Dawera dengan total desa pada tahun 2024 sebanyak 118 desa/kelurahan.

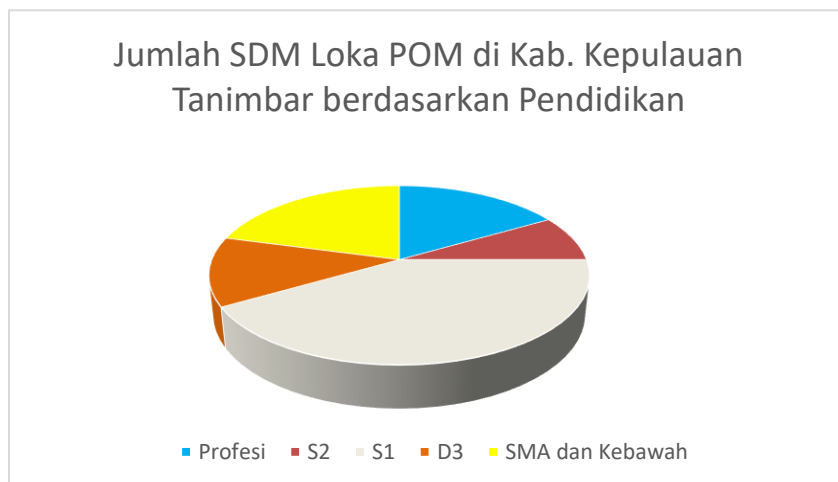
Keadaan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 84,51% adalah lautan dengan pulau-pulau kecil yang tersebar dan belum dapat diakses melalui transportasi udara, sehingga pola transportasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah 60% menggunakan transportasi laut dan 40% transportasi darat.

1.1.3 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara optimal, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai dengan tahun 2025 adalah 30 orang dengan rincian 18 Pegawai Negeri Sipil, 5 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 7 orang terbagi tenaga honorer dan outsourcing yang dibagi ke dalam beberapa fungsi

Tabel 1.1 Profil Pegawai Loka POM berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

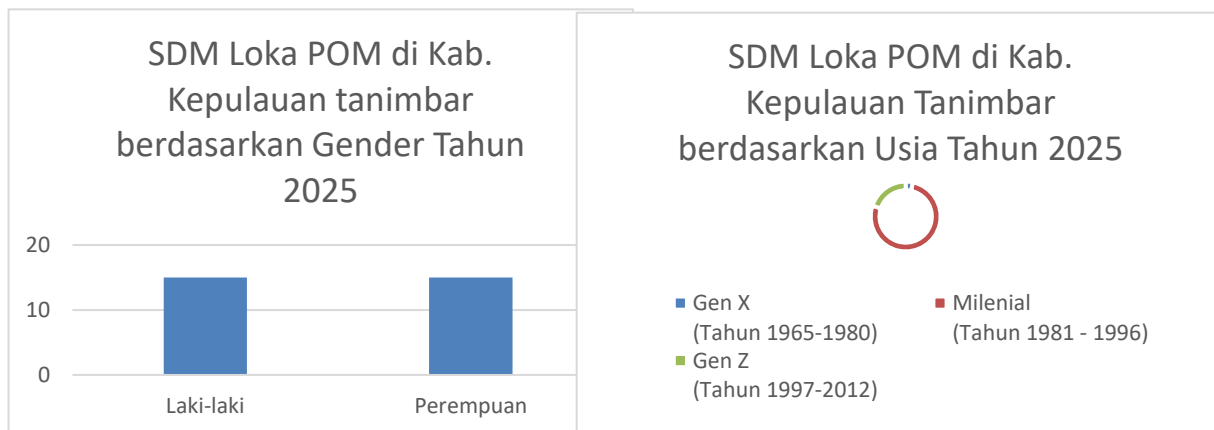
Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	Persentase (%)
Profesi	5	17
S2	1	3
S1	14	47
D3	5	17
SMA dan Ke bawah	5	17
Total	30	100



Gambar 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2025

Dari Tabel 1.1 dan Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa sebanyak 5 orang (17%) berpendidikan profesi, 1 orang (3%) berpendidikan S2, 14 orang (47%) berpendidikan S1, 5 orang (17%) berpendidikan D3 dan 5 orang (17%) berpendidikan SMA ke bawah.

Dikelompokkan berdasarkan usia pegawai, mayoritas pegawai Loka adalah generasi millenial yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan tugas. Hal ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sedangkan berdasar gender, jumlah pegawai pria pada tahun 2025 sebanyak 15 orang (40%) sebanding dengan pegawai wanita sebanyak 15 orang (50%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut



Gambar 1.4 Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kelompok Gender dan Usia

**Tabel 1.2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar
Tahun 2020 – 2024**

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT															
IKSS 1 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,10	82	92,03	83,60	81,65	97,67	86,60	91,67	105,85	90,0	94,34	104,82	94,40	97,22	102,99
IKSS 2 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	96,67	123,94	95,00	94,92	99,92	96,00	92,36	96,21	96,50	95,63	99,09	96,50	97,55	101,08
IKSS 3 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,10	66,67	74,83	83,6	78,05	93,36	84,50	90,48	107,08	85,00	100,00	117,65	95,20	95,45	100,27
IKSS 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	100	128,21	95,00	74,19	78,09	96,00	97,14	101,19	97,00	88,89	91,64	98,00	100,00	102,04
SS2: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan Makanan															

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSS 5 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,25	94,75	104,99
SS3: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT															
IKSS 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	97,37	111,92	89,00	96,97	108,95	90,00	99,50	110,56	91,00	98,30	108,02	98,40	98,74	100,35
IKSS 7 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	59,6	108,36	70,00	48,70	69,57	71,00	66,95	94,30	73,00	73,33	100,45	73,40	82,93	112,98
IKSS 8 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100	120	120	100	100	100

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSS 9 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	80	173,91	73,00	81,82	112,08	77,00	72,73	94,45	81,00	70,00	86,42	85,00	90,91	106,95
IKSS 10 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55,86	101,56	60,00	82,08	136,80	63,00	72,55	115,16	66,00	72,00	109,09	72,30	73,15	101,17
IKSS 11 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	80,00	100,00	125,00	82,00	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00
IKSS 12 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	100,00	105,26

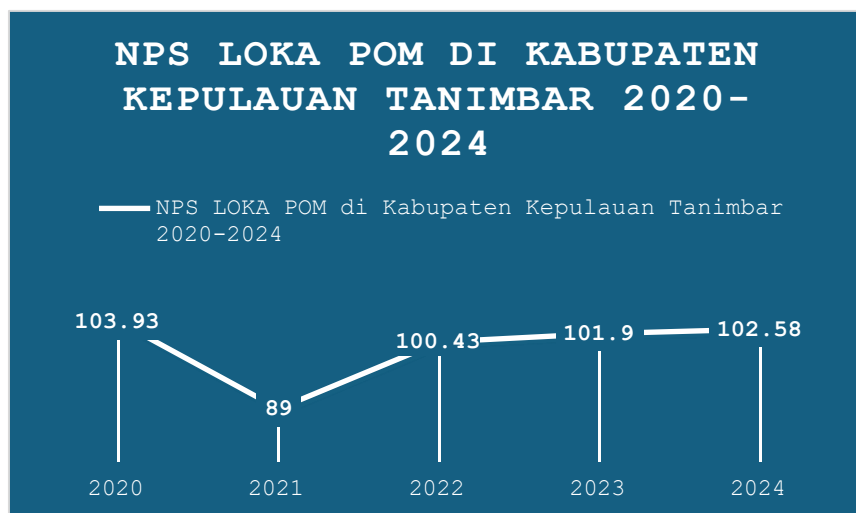
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
di Provinsi/ Kabupaten/ Kota															
SS4: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT															
IKSS 13 - Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	85,18	121,69	91,00	91,65	100,7 1	91,40	95,21	104,17	92,30	95,19	103,13	96,00	95,41	99,39
SS5: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT															
IKSS 14 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard	50	51,08	102,16	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100,00	50,00	50,67	101,33
IKSS 15 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standa	50	49,64	99,28	50,00	50,00	100	50,00	50,53	101,06	50,00	50,00	100,00	50,00	51,28	102,55
SS6: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT															
IKSS 16 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	30	60	80,00	15,00	18,75	83,00	100	120,48	87,00	55,00	63,22	90,00	43,33	48,14

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS7: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal															
IKSS 17 - Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
IKSS 18 - Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSS 19 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSS 20 - Nilai AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-	-	-	-	-	80,60	74,37	92,27	82,20	76,74	93,36	78,38	75,55	96,39
IKSS 21 – Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,95	90,17	106,14
SS8: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
IKSS 22 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	80	85,77	107,21	85,80	84,62	98,62	85,90	85,83	99,92	86,00	88,71	103,15	89,67	87,50	97,58

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS9: Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan															
IKSS 23 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-	-	-	-	2,25	1,5	66,67	2,50	3	120,00	3,00	3,00	100
SS10: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
IKSS 24 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105,26	95	100,00	105,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSS 25 – Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	90	91,11	101,23	90,60	91,14	100,60	91,80	87,90	95,75	90,00	91,91	102,12
IKSS 26 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,17	100,00	126,31
IKSS 27 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00	91,11	138,05
IKSS 28 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,10	94,80	105,22

(Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar, 2021, 2022, 2023, 2024).

Selama empat tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat sejak tahun 2021. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar berhasil menunjukkan peningkatan yang konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Nilai kinerja pada tahun 2023 mendekati capaian tertinggi yang diraih pada tahun 2020, yaitu 103,93. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar telah berhasil melakukan upaya perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan kinerja setelah penurunan di tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut



Gambar 1.5 Nilai Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar. Dalam penyusunan sasaran strategis, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang fluktuatif dengan total sebanyak 1.916 sarana dan jumlah produk obat dan makanan yang disampling untuk dilakukan pengujian adalah sebanyak 1.589 produk.
2. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan penjualan obat dan makanan secara online/daring pada marketplace dan sosial media. Pada

pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi *e-commerce*, dalam hal ini idEA (*Indonesian E-commerce Association*). Dalam kurun waktu 2020 s.d. September 2024, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar menemukan 4034 tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah direkomendasikan untuk dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.

3. Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2021-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 8 UMKM.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. 2024 kegiatan KIE fluktuatif dengan total 47 KIE dengan peserta sebanyak 2.307 orang. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 27 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). SK dan IKSS ini berubah sepanjang 2020-2024 mengikuti perjanjian kinerja dengan pusat. Beberapa SK yang ditambahkan sepanjang periode renstra sebelumnya misalnya SK9: Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan; baru ditambahkan pada tahun 2022, dan SK2: Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan Makanan; baru ditambahkan di tahun 2024. Selain SK, IKSS juga mengalami perubahan, sementara beberapa IKSS ada yang ditambahkan dan ada pula yang dihapuskan. Sehingga pada tahun 2024, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar memiliki 10 SS dan 25 IKSS. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT

Produk yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tergolong berisiko tinggi, sehingga pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis di sepanjang rantai pengawasan. Sistem ini harus mampu mendeteksi dini penurunan mutu, keberadaan produk substandar, atau potensi masalah lainnya agar langkah pencegahan dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat. Sasaran strategis ini diukur melalui empat indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat,
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat,
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan,

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar melakukan beberapa upaya yaitu:

- a. Melakukan pengambilan sampel produk secara acak (*random*) maupun terarah (*targeted*) untuk diuji di balai pengujian regional,
- b. Meningkatkan koordinasi dengan balai pengujian untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengujian, serta
- c. Melakukan randomisasi lokus pengambilan sampel agar mencerminkan kondisi nyata produk yang beredar.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan Makanan

Kepuasan pelaku usaha dan masyarakat merupakan faktor penting dalam pengawasan obat dan makanan. Sasaran strategis ini dapat diukur melalui indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik UPT. Untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini, beberapa upaya yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan responsivitas dan efisiensi yang lebih baik,
- b. Memperkuat komunikasi dan informasi yang transparan dan mudah diakses,
- c. Mengembangkan sistem pelayanan digital untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan,
- d. Melibatkan masyarakat dan pelaku usaha secara aktif melalui dialog dan konsultasi berkala, serta
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kepuasan layanan dengan menindaklanjuti hasil survei IKM dan masukan masyarakat.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Pengawasan obat dan makanan di Loka POM dilakukan secara menyeluruh, mencakup tahap sebelum produk beredar (pre-market) hingga setelah produk beredar (post-market) dengan beberapa kegiatan diantaranya, pemeriksaan dilakukan pada tempat produksi dan distribusi untuk memastikan produk yang beredar aman, bermanfaat, dan memenuhi standar mutu. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam mendukung tugas pengawasan di wilayah kerja Loka POM.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, terdapat enam indikator yaitu:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan,
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan,

- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu,
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dan
- 7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Adapun indikator ke-7 merupakan indikator baru yang ditambahkan pada tahun 2024
Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja SK 3 adalah:

- a) memperkuat kapasitas petugas melalui pelatihan dan pembimbingan yang rutin
- b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring;
- c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;
- d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat;
- e) melakukan pendampingan kepada UMKM secara menyeluruh;
- f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan;
- g) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
- h) menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- i) Mempertimbangkan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin optimal.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT

Sesuai dengan prinsip tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya adalah pengawasan berbasis masyarakat, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berupaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang aktif dan strategis. Pengetahuan masyarakat yang lebih baik diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku yang mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu. Capaian sasaran strategis ini diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SK4 adalah:

- a) Menyelenggarakan berbagai program KIE melalui forum tatap muka, kampanye publik, dan pemanfaatan media digital.
- b) Melibatkan komunitas lokal dan tokoh masyarakat menjadi prioritas agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih efektif dan merata, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard,
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu:

- a) Melakukan evaluasi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar,
- b) Mengoptimalkan waktu pengambilan sample agar proses pengiriman sample ke balai regional sesuai dengan *timeline* yang diberikan,
- c) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus- modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur

dengan satu indikator kinerja yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu:

- 1) Peningkatan kompetensi teknis petugas
- 2) Advokasi kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
- 3) Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS, serta
- 4) Penggalangan kepada pelaku usaha dan masyarakat

7 Sasaran Kegiatan (SK7)

Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur SK 7 adalah:

- 1) Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
- 2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
- 3) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
- 4) Nilai AKIP Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimba,
- 5) Nilai Pengelolaan Kearsipan.

Indikator ke-2 dan ke-3 tidak lagi digunakan sejak tahun 2024, sedangkan indikator ke-5 baru ditambahkan pada tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu:

- 1) Memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama
- 2) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat
- 4) Memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah
- 5) Melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional;

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan satu indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu:

1. Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi minimal 20 JP
2. Menegakan disiplin dan kode etik, serta kode perilaku agar tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
3. Mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal

9. Sasaran Kegiatan (SK9) Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai.. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu:

- 1) Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan memaksimalkan penggunaan email corporate
- 2) Meningkatkan kepatuhan verifikasi data
- 3) Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi

10. Sasaran Kegiatan (SK10) Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan menuntut akuntabilitas tinggi dalam penggunaannya. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga mendukung kredibilitas instansi dalam menjalankan tugasnya . Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan lima indikator yaitu:

- 1) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT
- 2) Nilai Kinerja Anggaran UPT
- 3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa,
- 4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- 5) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Indikator 1 sudah tidak digunakan sejak tahun 2022, sementara indikator 3,4, dan 5 merupakan indikator baru yang ditambahkan di tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu:

- 1) Optimalisasi pengelolaan anggaran
- 2) Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa
- 3) Meningkatkan sistem manajemen Barang Milik Negara
- 4) Memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan, sesuai dengan arahan pemerintah

1.1.4 Aspirasi Stakeholder

BPOM menyadari pentingnya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah tantangan masa depan. Dinamika global, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial ekonomi menuntut pengawasan yang adaptif dan inovatif. Dalam konteks ini, aspirasi dan masukan masyarakat menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, harapan, serta merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

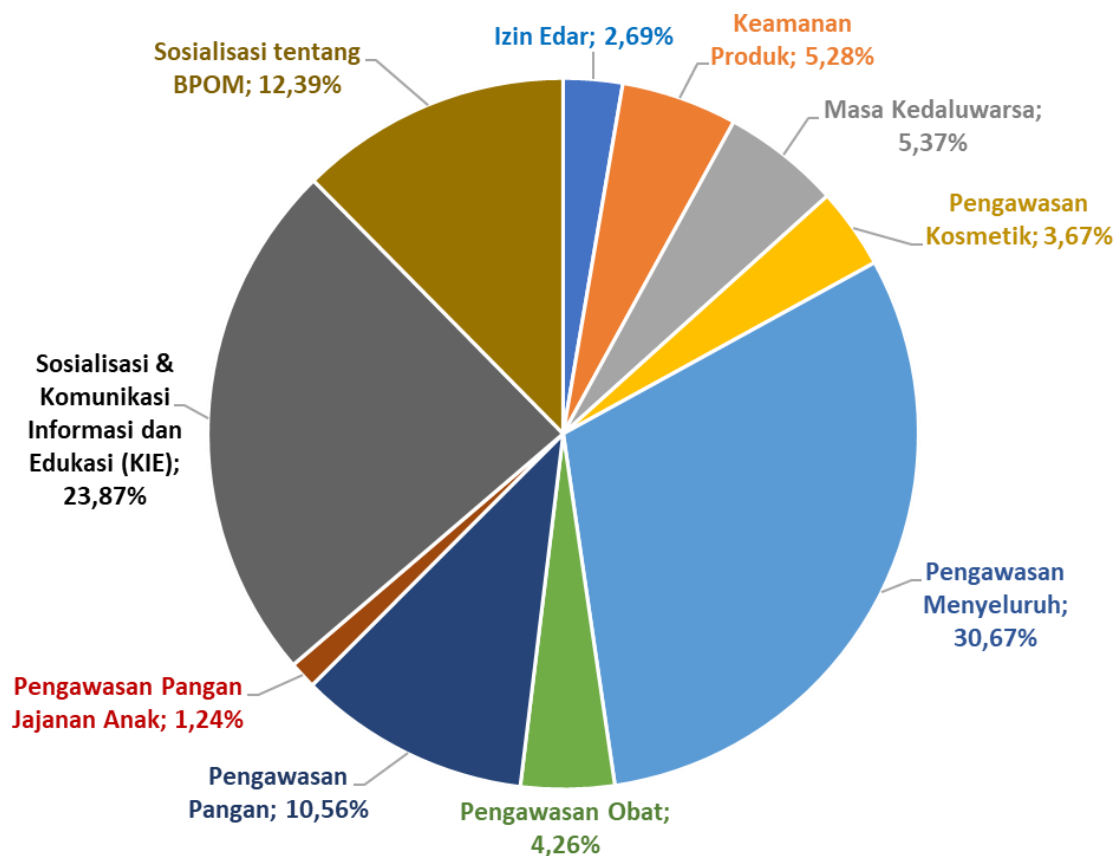
Aspirasi masyarakat memainkan peran strategis dalam membantu BPOM memahami dampak perubahan lingkungan strategis, seperti teknologi digital dan pergeseran demografi, terhadap pola konsumsi obat dan makanan. Dengan berlandaskan masukan tersebut, BPOM dapat mengembangkan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang relevan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM 2024, BPOM telah menganalisis masukan dari masyarakat di 38 provinsi di Indonesia untuk memperkuat strategi pengawasan yang inklusif. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari



masyarakat.

Gambar 1.5 Wordcloud dari hasil survey kepada masyarakat

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “*kinerja BPOM*”, “*Pengawasan Produk*”, dan “*Sosialisasi BPOM ke Masyarakat*”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.



Gambar 1.6 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut terhadap aspirasi tersebut, BPOM dan UPT di daerah, termasuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menginisiasi kegiatan aspirasi stakeholder melalui berbagai forum komunikasi publik. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan penyuluhan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya obat dan makanan yang aman dan bermutu. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tatap muka langsung maupun pemanfaatan media digital, serta melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, dan organisasi masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran

penting mereka dalam mendukung pengawasan obat dan makanan serta menjadi konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab. Adapun di tingkat lokal, aspirasi masyarakat juga mencerminkan berbagai isu utama yang dihadapi Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu

1. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana** – Masyarakat menginginkan peningkatan fasilitas untuk mendukung layanan yang lebih optimal, sejalan dengan kebutuhan pengawasan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
2. **Penanganan Pengaduan yang Transparan** – Aspirasi masyarakat menyoroti perlunya komunikasi yang lebih baik terkait tindak lanjut pengaduan, yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.
3. **Waktu Penyelesaian Layanan** – Masukan terkait lambatnya penyelesaian layanan menjadi pengingat untuk memperbaiki koordinasi lintas sektor agar layanan tetap sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
4. **Penyebaran Informasi yang Masif** – Kebutuhan masyarakat akan edukasi yang lebih luas terkait obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) dan berbahaya, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif melalui media visual dan kolaborasi lintas sektor.

Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar percaya bahwa pengawasan obat dan makanan adalah tugas dinamis yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat tidak hanya menjadi subjek pengawasan, tetapi juga aktor strategis yang dapat mendukung upaya ini dengan menjadi konsumen yang cerdas. Melalui penjangkauan aspirasi, Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program pengawasannya agar tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menjawab kebutuhan lokal.

1.2 Potensi dan Isu Permasalahan

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Loka Pom Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisi SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2025-2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Strength (Kekuatan)

Analisis kondisi internal Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki organisasi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kepulauan. Identifikasi kekuatan ini penting untuk memahami kapasitas organisasi, memetakan kapabilitas strategi, serta memastikan bahwa Loka POM Tanimbar dapat menjalankan mandat perlindungan

konsumen secara efektif meskipun berada pada wilayah 3T dengan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Kekuatan-kekuatan berikut menjadi modal utama dalam menjaga mutu pengawasan serta mendukung perencanaan strategi Loka POM Tanimbar ke depan.

a. Sistem Pengawasan yang Komprehensif dan Terstruktur

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki sistem pengawasan yang dibangun secara komprehensif dan terstruktur, mencakup seluruh tahapan pengawasan pra-edar hingga pasca-edar terhadap berbagai komoditas seperti obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Sistem ini mengikuti standar nasional BPOM dan telah disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki akses geografis terbatas dan kondisi cuaca ekstrem. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara sistematis melalui rangkaian kegiatan sampling, pemeriksaan sarana, audit distribusi, penelusuran produk, hingga tindak lanjut ketidaksesuaian dalam bentuk pembinaan, surat peringatan, ataupun rekomendasi penarikan produk.

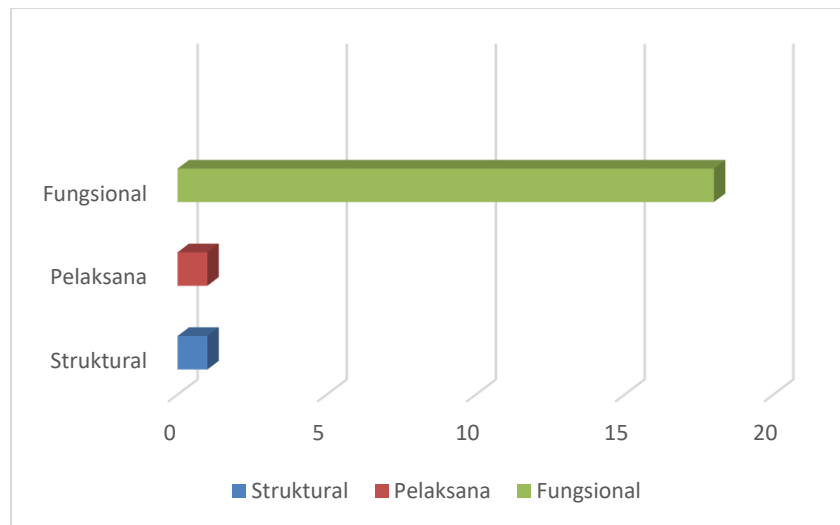
Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, Loka POM melakukan pemetaan sarana berbasis risiko secara berkala. Setiap tahun, ratusan sarana ritel pangan, toko obat, sarana kosmetik, UMKM pangan olahan, hingga fasilitas jasa boga telah dimasukkan ke dalam kategori risiko tinggi, menengah, dan rendah berdasarkan parameter riwayat pelanggaran, volume distribusi, dan tingkat kerawanan. Pemetaan ini menjadi dasar prioritas pengawasan lapangan di wilayah yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut.

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor dilakukan melalui operasi gabungan bersama Dinas Kesehatan, Polres, dan perangkat daerah untuk melakukan pengawasan terpadu terhadap produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan. Dokumentasi kegiatan dan pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara berkala sehingga menghasilkan sistem yang tidak hanya terstruktur, namun juga transparan dan akuntabel.

Dengan struktur kerja yang sistematis, dukungan aplikasi nasional, pemetaan risiko yang jelas, serta jangkauan pengawasan hingga pulau-pulau terluar, sistem ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan mutu produk di wilayah Tanimbar dan Maluku Barat Daya.

b. Komitmen, Disiplin, dan Kompetensi SDM yang Memadai

Salah satu kekuatan utama Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Berdasarkan data terbaru, Loka POM Tanimbar memiliki 30 pegawai, yang terdiri dari ASN 18 orang, PPPK 5 Orang, serta Tenaga pendukung seperti administrasi, pengemudi, petugas keamanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 6 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa walaupun personel belum sepenuhnya ideal, unit kerja tetap mampu menjalankan seluruh tugas pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Gambar diagram batang horizontal yang ditampilkan menggambarkan komposisi jabatan struktural, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Loka POM Tanimbar. Dalam visualisasi tersebut terlihat bahwa jabatan fungsional merupakan kelompok terbesar, menggambarkan dominasi tenaga teknis yang menjalankan kegiatan operasional pengawasan, mulai dari pemeriksaan sarana hingga pengambilan sampel. Sementara itu, jabatan struktural dan pelaksana berperan mendukung tata kelola administrasi dan manajerial unit kerja. Grafik ini menegaskan bahwa proporsi SDM telah diarahkan untuk memperkuat fungsi teknis yang menjadi inti dari pelaksanaan tugas di wilayah kepulauan.

Mayoritas ASN memiliki latar belakang Pendidikan yang relevan, seperti farmasi, biologi, akuntansi, hukum, teknik pangan, kesehatan masyarakat dan ahli madya. Keberagaman keahlian ini mendukung pelaksanaan kegiatan teknis seperti pemeriksaan sarana, pengambilan sampel, verifikasi berbasis risiko, kegiatan KIE, hingga penyusunan laporan rutin. Selain tugas teknis, beberapa pegawai juga menjalankan fungsi pendukung, termasuk pengelolaan keuangan, pelayanan publik, teknologi informasi, dan perencanaan.

Pegawai Loka POM Tanimbar juga memiliki tingkat adaptabilitas tinggi dalam menghadapi kondisi geografis dan operasional di wilayah 3T, seperti perjalanan antar pulau, cuaca ekstrem, serta keterbatasan transportasi. Tidak sedikit pegawai yang merangkap berbagai tugas, namun tetap mampu mempertahankan kualitas layanan dan memenuhi target kinerja triwulan dan tahunan secara konsisten.

Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui bimtek dan pendampingan tugas, yang efektif meningkatkan kemampuan teknis serta administratif. Berbagai materi peningkatan kapasitas telah diberikan, seperti teknis pemeriksaan sarana, sampling terpadu, komunikasi risiko, keamanan pangan, pengelolaan data, dan penguatan layanan publik. Berkat pembinaan yang berkelanjutan dari BPOM Pusat dan Balai Koordinator, kompetensi pegawai terus berkembang sesuai kebutuhan pengawasan.

Tingkat kedisiplinan pegawai terefleksi dari ketepatan waktu penyampaian laporan, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pencapaian target kinerja yang baik. Selain itu, peta kompetensi yang dikelola secara berkala memungkinkan penempatan pegawai sesuai keahlian masing-masing, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pengembangan SDM ke depan.

Struktur Kompetensi ini semakin diperkuat dengan keberadaan berbagai Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pengawas Farmasi dan Makanan	13
2	Perencana Ahli Pertama	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1
4	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
5	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
6	Pranata Komputer Terampil	1
7	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
8	Penata Laksana Barang Terampil	1

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebagaimana besar pegawai berada pada jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, yang merupakan ujung tombak dalam pengawasan obat dan makanan. Keberadaan jabatan fungsional pendukung seperti perencana, pranata komputer, keuangan, serta pengelola SDM turut memperkuat tata kelola organisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Dengan komitmen, kedisiplinan, serta kompetensi yang terus diperkuat, SDM Loka POM Tanimbar menjadi pondasi penting dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan pengawasan obat dan makanan di wilayah kepulauan yang penuh tantangan.

c. Komitmen terhadap Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi

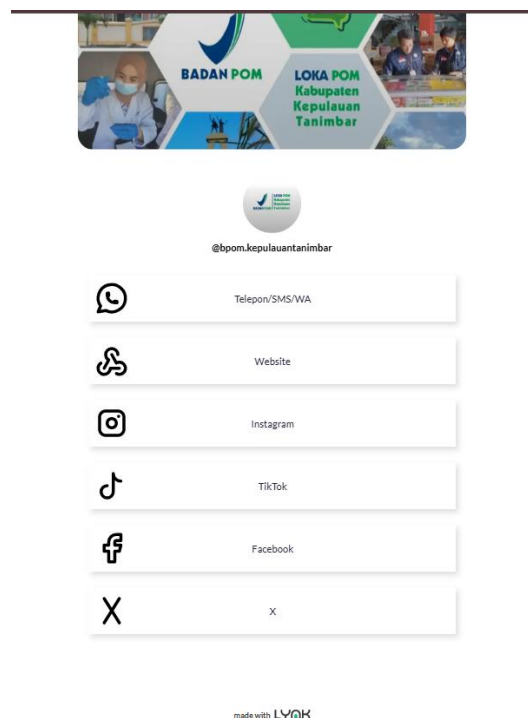
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, ramah, dan responsif. Sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki mandat perlindungan konsumen, Loka POM menyediakan berbagai layanan publik, antara lain layanan konsultasi keamanan produk, informasi izin edar, pendampingan legalitas UMKM pangan olahan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Seluruh layanan ini dapat diakses melalui kunjungan langsung ke kantor, kanal WhatsApp, email layanan, hingga media sosial resmi.

Keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui publikasi rutin kegiatan pengawasan, informasi produk bermasalah, dan materi edukasi melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Website Loka POM Tanimbar. Di kantor, media informasi juga diperbarui secara berkala, meliputi poster edukasi, banner, leaflet, serta papan layanan publik, sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi yang relevan dan mudah dipahami.

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menjadi pilar penting dalam menjangkau masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Pelaksanaan KIE dilakukan di sekolah, pasar, desa, fasilitas pelayanan kesehatan, serta komunitas masyarakat di pulau-pulau terluar, dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga UMKM lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan literasi masyarakat mengenai keamanan obat dan pangan, tetapi juga memperkuat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik tercermin dari Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 yang mencapai nilai 4,04, menunjukkan tren positif pada aspek akses informasi, kepuasan pengguna layanan, kecepatan respons, serta kemudahan memperoleh layanan konsultasi. Seluruh pengaduan masyarakat dicatat, ditangani, dan diarsipkan secara sistematis sehingga mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai wujud kemudahan akses layanan, Loka POM Tanimbar juga menyediakan halaman profil layanan digital melalui platform *Lynk.id* (<https://lynk.id/bpom.kepulauantanimbar>).



Gambar 1.7 Platform Lynk.id Loka POM Tanimbar

Sebagaimana terlihat pada gambar. Halaman tersebut berisi tombol akses cepat menuju Telepon/SMS/WhatsApp, Website, Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Tampilan yang sederhana dan informatif ini dirancang untuk memudahkan masyarakat menjangkau seluruh kanal resmi Loka POM, sekaligus mendukung transparansi dan keterbukaan layanan publik secara digital.

1.2.2 Weakness (Kelemahan)

Dalam menghadapi dinamika pengawasan obat dan makanan di wilayah kepulauan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak terlepas dari sejumlah area yang membutuhkan peningkatan. Tantangan geografis, keterbatasan fasilitas, hingga distribusi SDM yang belum ideal menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan maupun pelayanan publik. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan ini menjadi langkah awal yang penting agar Loka POM Tanimbar dapat memperkuat kapasitas internal, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan masyarakat di wilayah 3T tetap memperoleh perlindungan yang optimal. Berikut adalah kelemahan utama yang memerlukan perhatian dan penguatan ke depan.

a. Jumlah dan Sebaran SDM yang Belum Memadai

Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) menunjukkan bahwa ketersediaan SDM di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal. Berdasarkan komposisi pegawai, jumlah pegawai yang tersedia saat ini adalah 23 orang, sedangkan kebutuhan menurut ABK mencapai 32 pegawai, sehingga terdapat GAP kekurangan 9 pegawai. Ketidakseimbangan ini terlihat terutama pada jabatan teknis yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan.

Kekurangan paling signifikan berada pada jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, dengan kebutuhan 5 pegawai, tetapi yang tersedia baru 2 pegawai, sehingga terdapat GAP 3 pegawai. Pada jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, kebutuhan mencapai 12 pegawai, namun pegawai yang tersedia baru 10, sehingga masih terdapat GAP 2 pegawai. Kekurangan juga terlihat pada jabatan Analis Pengelolaan APN Ahli Pertama, dengan kebutuhan 2 pegawai, sedangkan yang tersedia hanya 1 pegawai.

Sementara itu, beberapa jabatan pelaksana menunjukkan surplus pegawai, seperti jabatan pelaksana yang memiliki kelebihan satu orang dan penata layanan operasional yang memiliki kelebihan dua orang. Namun, kelebihan tersebut tidak mampu mengimbangi kekurangan pada jabatan teknis pengawasan, karena peran pelaksana tidak dapat menggantikan fungsi pengawasan yang membutuhkan kompetensi dan kualifikasi khusus.

Ketidakseimbangan jumlah dan distribusi pegawai tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan tugas operasional. Pegawai harus merangkap beberapa fungsi sekaligus, termasuk pengawasan, administrasi, penyusunan laporan, serta kegiatan komunikasi publik. Kondisi ini meningkatkan beban kerja, menurunkan efisiensi, serta berpotensi memengaruhi kualitas hasil pengawasan dan pelayanan publik. Selain itu, keterbatasan jumlah pengawas menyebabkan frekuensi inspeksi di daerah terpencil tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Apabila tidak disertai dengan penambahan SDM sesuai kebutuhan ABK dan strategi peningkatan kapasitas pegawai, kondisi ini dapat menghambat pencapaian target kinerja strategis, terutama dalam konteks wilayah kepulauan yang membutuhkan

intensitas pengawasan dan mobilisasi sumber daya yang lebih besar.

b. Keterbatasan Fasilitas dan Kapasitas Pengujian

Fasilitas pengujian di Loka POM Tanimbar masih bersifat dasar dan terbatas pada penggunaan alat uji cepat (rapid test kit) untuk parameter-parameter tertentu, khususnya pada komoditas pangan. Sementara itu, untuk pengujian obat, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya masih harus dikirim ke Balai Koordinator, yang berlokasi cukup jauh di luar pulau. Kondisi ini membuat waktu penyelesaian hasil pengujian menjadi lama dan berdampak pada keterlambatan tindak lanjut terhadap temuan lapangan. Selain itu, keterbatasan alat pengujian juga membatasi ruang lingkup pemantauan keamanan produk yang beredar di pasaran.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga analis yang terbatas juga menjadi kendala dalam optimalisasi laboratorium. Untuk mencapai pengawasan yang mandiri dan efisien, diperlukan peningkatan kapasitas laboratorium baik dari sisi infrastruktur, ketersediaan peralatan uji standar, maupun peningkatan kompetensi tenaga pengujian. Dengan peningkatan ini, diharapkan Loka POM Tanimbar dapat melakukan pengujian lebih banyak parameter secara mandiri dan mempercepat proses penegakan hukum terkait pelanggaran produk tidak layak edar.

c. Pengelolaan Administrasi dan Teknologi Informasi yang belum terintegrasi

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga analis yang terbatas juga menjadi kendala dalam optimalisasi laboratorium. Untuk mencapai pengawasan yang mandiri dan efisien, diperlukan peningkatan kapasitas laboratorium baik dari sisi infrastruktur, ketersediaan peralatan uji standar, maupun peningkatan kompetensi tenaga pengujian. Dengan peningkatan ini, diharapkan Loka POM Tanimbar dapat melakukan pengujian lebih banyak parameter secara mandiri dan mempercepat proses penegakan hukum terkait pelanggaran produk tidak layak edar.

Keterbatasan jaringan internet di beberapa area kerja juga menjadi hambatan serius dalam penerapan sistem administrasi berbasis daring. Beberapa aplikasi resmi BPOM belum dapat digunakan secara maksimal karena gangguan koneksi atau keterbatasan perangkat. Selain itu, belum adanya sistem informasi internal yang terintegrasi antar-substansi menyebabkan koordinasi masih dilakukan secara konvensional, baik melalui pertemuan langsung maupun dokumen fisik.

Hal ini berdampak pada efisiensi waktu, akurasi data, serta kemampuan organisasi dalam mengakses data historis atau melakukan analisis berbasis data. Ke depan, perlu dikembangkan sistem manajemen informasi internal yang efisien, pelatihan literasi digital bagi pegawai, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi agar proses administrasi dan pelaporan dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.

1.2.3 Opportunity (Peluang)

Sebagai UPT yang beroperasi di wilayah kepulauan dan perbatasan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki ruang strategis untuk memperkuat kinerjanya melalui pemanfaatan berbagai peluang eksternal yang muncul dari perkembangan teknologi, regulasi nasional, serta kerja sama lintas sektor. Peluang-peluang ini semakin relevan mengingat Loka POM Tanimbar memiliki sejumlah kekuatan internal, antara lain komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta kedekatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kombinasi antara kekuatan internal dan peluang eksternal tersebut membuka ruang bagi penguatan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap karakteristik geografis daerah kepulauan.

a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang besar bagi Loka POM Tanimbar untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengawasan. Digitalisasi dalam pengarsipan dokumen, pelaporan kegiatan, hingga pengawasan berbasis aplikasi dapat meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi pelaksanaan tugas. Pemanfaatan teknologi seperti e-monitoring, sistem pelaporan daring, serta platform komunikasi publik digital dapat membantu menjangkau wilayah yang luas dan sulit diakses secara fisik.

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara virtual melalui media sosial dan platform daring, sehingga pesan pengawasan dapat disampaikan secara lebih luas dan efektif kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah kepulauan.

b. Dukungan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan

Dukungan regulasi melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi pijakan hukum yang memperkuat kedudukan BPOM, termasuk unit kerja di daerah seperti Loka POM Tanimbar. Kebijakan tersebut memberikan landasan kelembagaan yang jelas, memperluas kewenangan, dan membuka peluang bagi peningkatan dukungan sumber daya, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun SDM.

Selain itu, adanya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah 3T melalui berbagai program afirmatif membuka peluang penguatan peran Loka POM sebagai garda depan perlindungan konsumen di daerah perbatasan. Kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait juga berpotensi memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat peningkatan kapasitas lembaga di tingkat lokal.

c. Kolaborasi dan Kemitraan Lintas Sektor

Peluang kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha lokal menjadi potensi besar dalam memperkuat pelaksanaan pengawasan di lapangan. Melalui kolaborasi lintas sektor, Loka POM Tanimbar dapat memperluas jangkauan kegiatan KIE, melakukan pengawasan bersama, serta memperkuat peran edukatif kepada masyarakat.

Kerja sama ini tidak hanya memperluas dampak program, tetapi juga meningkatkan

kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan obat dan makanan. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk integrasi program pengawasan ke dalam kebijakan daerah juga menjadi peluang penting untuk memperkuat posisi Loka POM dalam sistem pemerintahan daerah.

1.2.4 Threat (Ancaman)

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kepulauan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas program dan pencapaian tujuan strategis. Ancaman ini muncul dari karakteristik geografis, kondisi infrastruktur, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih beragam. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar Loka POM dapat menyusun langkah mitigasi yang adaptif, terutama dalam konteks wilayah 3T yang memiliki dinamika tersendiri. Berikut ancaman utama yang berpotensi memengaruhi kinerja Loka POM Tanimbar:

a. Kondisi Geografis dan Cuaca Ekstrem

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan jarak antarpulau yang cukup jauh menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan. Perjalanan antarwilayah sering kali memerlukan waktu berjam-jam hingga berhari-hari, tergantung kondisi cuaca dan transportasi laut yang tersedia. Cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan deras kerap menyebabkan penundaan kegiatan atau bahkan membatasi mobilitas pengawasan di wilayah terluar. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional, keterlambatan pelaporan, dan risiko keselamatan bagi pegawai yang bertugas di lapangan.

b. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan Transportasi

Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi menjadi ancaman utama terhadap efektivitas pengawasan. Tidak semua wilayah di Kepulauan Tanimbar memiliki akses internet stabil, bahkan di beberapa pulau sinyal seluler tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini menyulitkan pelaporan daring, koordinasi cepat, serta pemantauan kegiatan pengawasan. Selain itu, moda transportasi laut dan udara yang tidak memiliki jadwal tetap juga menghambat mobilitas pegawai dan pengiriman sampel pengujian. Keterbatasan ini berpotensi menurunkan efisiensi kerja serta memperlambat respon terhadap potensi pelanggaran yang membutuhkan tindakan cepat.

c. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Masyarakat

Masih terdapat sebagian masyarakat dan pelaku usaha di wilayah pengawasan yang belum memahami pentingnya izin edar, keamanan produk, serta standar mutu pangan dan obat. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat juga menghambat penyebaran informasi melalui media daring. Hal ini menyebabkan produk ilegal dan tidak terdaftar masih beredar, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau pengawasan langsung. Kondisi ini memerlukan pendekatan KIE yang adaptif, berbasis komunitas, dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan dalam

peningkatan kesadaran publik.

Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength 1. Sistem Pengawasan yang Komprehensif dan Terstruktur 2. Komitmen, disiplin, dan kompetensi SDM yang memadai 3. Komitmen terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi	Weakness 1. Jumlah dan sebaran SDM yang belum memadai 2. Keterbatasan fasilitas dan kapasitas pengujian 3. Pengelolaan administrasi dan teknologi informasi yang belum terintegrasi
Opportunities 1. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik 2. Dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan 3. Kolaborasi dan kemitraan lintas sektor	Threats 1. Kondisi geografis dan cuaca ekstrem 2. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan transportasi 3. Rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Maluku dengan wilayah kerja 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman

Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu

BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing

BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera

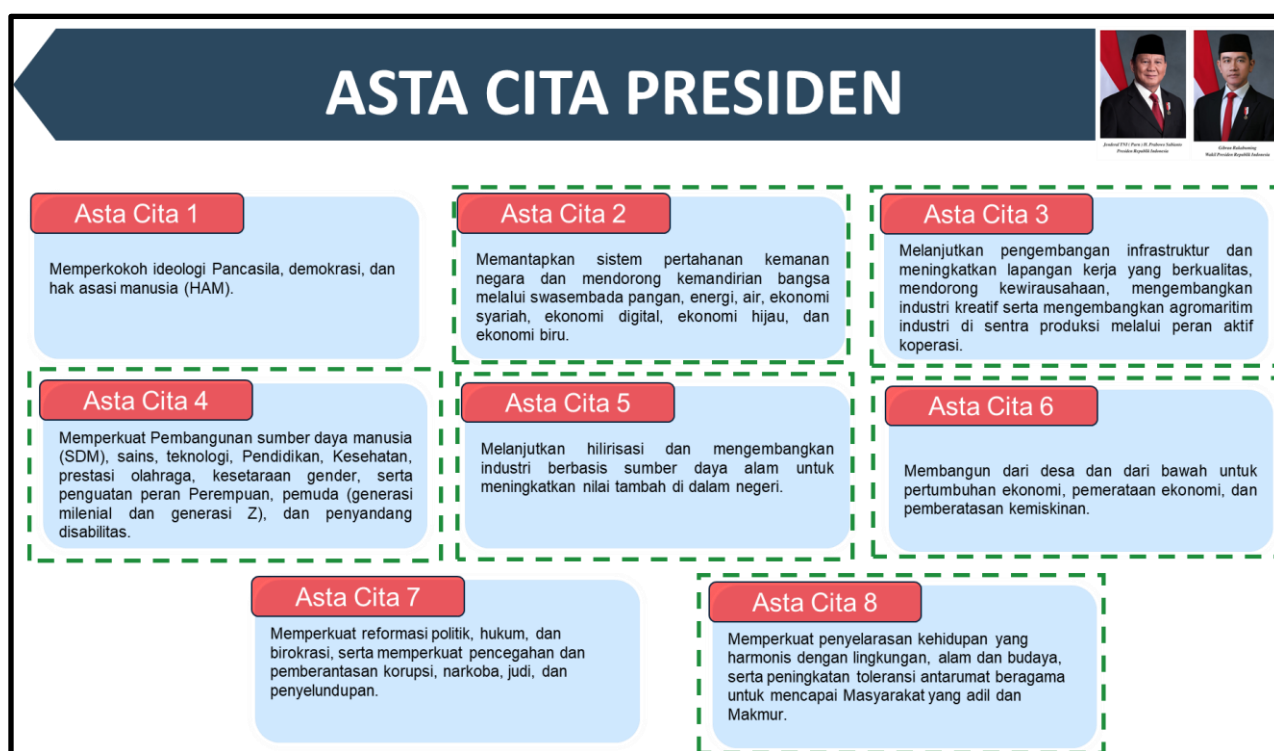
Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang

Sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, BPOM telah merumuskan 8 (delapan) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun

2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif dipasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan peizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diuku melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MGB yang aman dan bermutu)	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Idenks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 3 : Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur

capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6 : Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7 : Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8 : Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan

anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/ atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampaingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	<i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. <i>Nilai AKIP UPT BPOM</i> 2. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> 3. <i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i> 4. <i>Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT</i>

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Loka POM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Meningkatnya jumlah kasus KLB keracunan pangan secara nasional. b. Keterbatasan sarana laboratorium. c. Meningkatnya jumlah produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar.	a. Melaksanakan pengawasan pre- dan post-market berbasis risiko, termasuk pengawasan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). b. Meningkatkan efektivitas pengawasan melalui pendekatan berbasis risiko pada sarana dan produk Obat serta Pangan Olahan yang beredar di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. c. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas laboratorium rujukan di Balai POM Ambon untuk mendukung kegiatan pengujian dan pemantauan mutu produk.	Tim kerja pemeriksaan Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Balai Besar POM Ambon sebagai laboratorium rujukan

			d. Melaksanakan sampling rutin terhadap produk pangan dan obat tradisional yang beredar, terutama pada wilayah sulit dijangkau dan pelabuhan masuk barang.	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang menjangkau seluruh wilayah dan kelompok sasaran.	a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan KIE berbasis analisis perilaku masyarakat di wilayah kepulauan. b. Melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis bagi pelaksana KIE di lapangan. c. Memperluas jangkauan KIE melalui kerja sama lintas sektor, CSR, dan media lokal. d. Melakukan evaluasi efektivitas kegiatan KIE secara berkala.	Tim Kerja Infokom Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Masih rendahnya penerapan Cara Produksi yang Baik (CPOTB, CPKB, CPPOB) pada pelaku UMKM.	a. Melaksanakan pendampingan dan edukasi bagi pelaku UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan. b. Membentuk fasilitator pendamping UMKM di lingkungan Loka POM. c. Melakukan monitoring,	Tim kerja Pemeriksaan dan Infokom Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar

			evaluasi, dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan standar produksi yang baik. d. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi untuk peningkatan kapasitas dan sertifikasi pelaku usaha.	
4	Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Masih maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, baik secara luring maupun daring, serta lemahnya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran	e. Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. f. Meningkatkan kapasitas PPNS dan petugas intelijen lapangan. g. Mengoptimalkan sistem dashboard penindakan untuk deteksi dini dan pelaporan kasus. h. Melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat.	Tim kerja Penindakan Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5	Terwujudnya birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif, dan adaptif untuk pelayanan	Struktur organisasi yang masih terbatas, potensi gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang, serta pemberitaan negatif	a. Melakukan evaluasi organisasi dan tata kerja untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. b. Menerapkan kebijakan	Kepala Loka POM bersama seluruh pegawai

	publik yang prima	terhadap kinerja lembaga.	antikorupsi, pengendalian gratifikasi, dan sistem pelaporan benturan kepentingan. c. Menyebarluaskan informasi positif melalui publikasi kegiatan dan kerja sama media lokal.	
--	----------------------	------------------------------	---	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan

- produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
 4. pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
 6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
 7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian

transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Indonesia memasuki fase menuju Indonesia Emas 2045 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang RPJPN 2025-2045. RPJPN bertujuan mewujudkan Indonesia yang bersatu, maju, dan berkelanjutan melalui transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Fokus utamanya adalah pembangunan wilayah merata, infrastruktur ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan, dengan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan untuk pertumbuhan inklusif dan ketahanan sosial budaya.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan (PJP POM) untuk mendukung transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045 terdiri atas Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tatakelola. Transformasi sosial di Indonesia fokus pada pengurangan stunting, peningkatan harapan hidup, dan pengendalian penyakit menular serta produk berbahaya seperti rokok. Di bidang ekonomi, Indonesia mengarah pada hilirisasi produk obat dan makanan untuk ekspor, peningkatan UMKM, dan pengembangan ekonomi sirkular melalui bioteknologi dan digitalisasi. Sementara itu, transformasi tatakelola mencakup manajemen ASN berbasis merit, regulasi adaptif, serta penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pemerintahan. Semua upaya ini bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan perekonomian nasional.

Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan

dukungan yang kuat terhadap UMKM

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan analisa program strategis dengann memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperkuat pengawasan *pre* dan *post-market* melalui sistem berbasis risiko yang disesuaikan dengan kondisi geografis kepulauan. Pengawasan dilakukan secara terpadu bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjangkau wilayah terpencil. Digitalisasi melalui *e-monitoring* dan *e-reporting* menjadi fokus utama guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan teknis serta pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawasan partisipatif. Loka POM juga berperan aktif dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan keamanan dan mutu pangan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan, kesehatan, dan penyedia layanan makan bergizi
2. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya deteksi dini, pencegahan, dan penindakan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Pengawasan difokuskan pada pemantauan peredaran produk ilegal, termasuk penjualan daring (*online*), serta pemberdayaan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran melalui saluran pengaduan publik.
3. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan pendampingan intensif bagi pelaku UMKM pangan olahan melalui bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi, serta asistensi pemenuhan standar keamanan pangan. Kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan dinas terkait untuk meningkatkan daya saing produk lokal, khususnya produk unggulan kepulauan.
4. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan edukasi dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui sosialisasi, media lokal, dan kegiatan desa binaan. Program *Ayo Cek KLIK* dan pengawasan partisipatif terus diperkuat guna mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan.
5. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperkuat kemitraan dengan lintas sektor di tingkat daerah, seperti Pemerintah Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, serta lembaga pendidikan. Sinergi ini diarahkan untuk mendukung kegiatan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, dan edukasi publik terkait obat dan

makanan aman.

6. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, penggunaan sarana uji cepat, dan penerapan sistem pelaporan digital. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk mempercepat proses pengawasan, pelaporan, serta integrasi data dengan BPOM pusat
7. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan reformasi birokrasi internal melalui peningkatan efisiensi kerja, perbaikan sistem pelayanan publik, serta penggunaan aplikasi berbasis elektronik dalam tata kelola administrasi dan pelaporan anggaran. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Tabel 3. Arah Kebijakan dan Strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategis Loka POM Tanimbar
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperkuat pengawasan <i>pre</i> dan <i>post-market</i> melalui sistem berbasis risiko yang disesuaikan dengan kondisi geografis kepulauan. Pengawasan dilakukan secara terpadu bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjangkau wilayah terpencil. Digitalisasi melalui <i>e-monitoring</i> dan <i>e-reporting</i> menjadi fokus utama guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan teknis serta pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawasan partisipatif. Loka POM juga berperan aktif dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan keamanan dan mutu pangan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan, kesehatan, dan penyedia layanan makan bergizi.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya deteksi dini, pencegahan, dan penindakan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Pengawasan difokuskan pada pemantauan peredaran produk ilegal, termasuk penjualan daring (<i>online</i>), serta pemberdayaan masyarakat

	dalam melaporkan pelanggaran melalui saluran pengaduan publik.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan pendampingan intensif bagi pelaku UMKM pangan olahan melalui bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi, serta asistensi pemenuhan standar keamanan pangan. Kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan dinas terkait untuk meningkatkan daya saing produk lokal, khususnya produk unggulan kepulauan.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan edukasi dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui sosialisasi, media lokal, dan kegiatan desa binaan. Program <i>Ayo Cek KLIK</i> dan pengawasan partisipatif terus diperkuat guna mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperkuat kemitraan dengan lintas sektor di tingkat daerah, seperti Pemerintah Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, serta lembaga pendidikan. Sinergi ini diarahkan untuk mendukung kegiatan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, dan edukasi publik terkait obat dan makanan aman.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, penggunaan sarana uji cepat, dan penerapan sistem pelaporan digital. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk mempercepat proses pengawasan, pelaporan, serta integrasi data dengan BPOM pusat.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan reformasi birokrasi internal melalui peningkatan efisiensi kerja, perbaikan sistem pelayanan publik, serta penggunaan aplikasi berbasis elektronik dalam tata kelola administrasi dan pelaporan anggaran. Upaya ini

	diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel.
--	--

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

a. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mencakup kegiatan pre market dan post market terhadap sediaan farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko, yang disesuaikan dengan kondisi geografis kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Loka POM Tanimbar melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta lintas sektor terkait dalam menjangkau wilayah pengawasan yang luas dan terpencil.

Selain itu, pengawasan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kerja Loka POM Tanimbar. Melalui kegiatan sampling, inspeksi sarana produksi dan distribusi, serta uji cepat terhadap bahan pangan, Loka POM memastikan bahwa pangan yang digunakan dalam program MBG memenuhi standar keamanan dan mutu.

Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan ini melalui penggunaan sistem e-monitoring dan e-reporting guna mempercepat pelaporan hasil pengawasan dan meningkatkan akurasi data. Dalam pelaksanaan tugas, Loka POM Tanimbar terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan secara langsung maupun daring.

Kegiatan pengawasan ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga kehadiran Loka POM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah kepulauan

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja

pegawai, pemeliharaan fasilitas kantor, dan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mendukung operasional pengawasan obat dan makanan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks daerah kepulauan, kegiatan pengelolaan prasarana difokuskan pada pemeliharaan sarana transportasi, jaringan komunikasi, dan fasilitas kerja yang memadai agar kegiatan lapangan dapat dilaksanakan dengan lancar, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, peningkatan manajemen efisiensi pelaksanaan anggaran dan pelaporan yang transparan.

Loka POM Tanimbar juga berupaya memperkuat tata kelola melalui penerapan sistem manajemen aset yang terintegrasi, pengawasan internal rutin, serta peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik, diharapkan kegiatan pengawasan dapat berjalan optimal, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM di wilayah kepulauan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan sasaran kegiatan yang mencerminkan visi BPOM dan Indikator Kinerja Utama dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar selama periode lima tahun. Terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025- 2029 tergambar dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 .Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kab Kepulauan Tanimbar 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	83	84	85	86
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	89	90	91	92
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	78	80	82	84	85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95

		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	96.25	97.25	97.75	98.25
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,72	95,6	96,4	97,2	98
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90	91	92	93	94
		Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	50	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	12	13	16	20
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.87	86.73	87.59	88.45	89.30
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10	20	40	70	100
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	65	70	75	80	85

	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	UPT					
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,85	3,9	3,95	4
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76,55	77	77,55	78	78,55
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.66	2.7	2.72	2.76	2.8
		Presentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100

Tabel 4.1 berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025-2029.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut:

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 Berdasarkan Program

Program	Alokasi (Rp Ribu)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	10.049.313	2.828.151	19.274.651	2.133.651	2.133.651
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.203.747	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.150.000
TOTAL	12.253.060	5.828.151	22.374.651	5.283.651	5.283.651

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Ribu)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	12.253.060	5.828.151	22.374.651	5.283.651	5.283.651
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	12.253.060	5.828.151	22.374.651	5.283.651	5.283.651

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Maluku dengan wilayah kerja 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan selama lima (5) tahun. Rencana strategis tahun 2025-2029 harus dijadikan sebagai acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua bidang kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini dimungkinkan karena setiap target yang ditetapkan mengacu pada target capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2025-2029 dapat memberikan kontribusi terhadap visi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Organisasi Pelaksana
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar			Kab. Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya						10.049.313	2.828.151	19.274.651	2.133.651	2.133.651	UPT BPOM
Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan													UPT BPOM
	1.1.	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar		82	83	84	85	86						UPT BPOM
	1.2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		-	27	28	29	30						UPT BPOM

	1.3.	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						UPT BPOM
	1.4.	Persentase KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	1.5	Persentase sampel PIRT keracunan pangan yang diuji sesuai standar		85	89	90	91	92						UPT BPOM
	1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		78	80	82	84	85						UPT BPOM
	1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang		91	92	93	94	95						UPT BPOM

		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
	1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	88	90	92	95						UPT BPOM
	1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		95	96.25	97.25	97.75	98.25						UPT BPOM
	1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95						UPT BPOM

	1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		94.72	95.6	96.4	97.2	98						UPT BPOM
	1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboatorium		11	12	13	16	20						UPT BPOM

	1.15	Persentase kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		50	100	100	100	100						UPT BPOM
	1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		-	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1 : Fasillitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	10	12	14	16						
	RO 2 : Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			149	149	150	152	154						UPT BPOM
	RO 3 : Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			108	109	115	121	127						UPT BPOM
	RO 4 : Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			4	6	7	7	8						UPT BPOM

	RO 5 : Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		271	285	299	314	331						UPT BPOM
	RO 6 : Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang sesuai standar oleh UPT BPOM		84	84	84	84	84						UPT BPOM
	RO 7 : Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8 : Laboratorium pengawas Obat dan Makanan yang sesuai standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9 : Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 10 : Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			87	87	87	87						UPT BPOM

	Meningkatnya efektivitas KIE												
	2.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		85.87	86.73	87.59	88.45	89.30					UPT BPOM
	2.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	6					UPT BPOM
	2.3	Jumlah desa pangan aman		1	1	1	1	1					UPT BPOM
	2.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1					UPT BPOM
	RO 1 : Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			104	150	180	216	259					UPT BPOM
	RO 2 : Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			25	10	11	13	14					UPT BPOM

	RO 3 : Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	6						UPT BPOM
	RO 4 : Desa Pangan Aman		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5 : Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												
3.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan		10	20	40	70	100						UPT BPOM
	RO 1 : UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		1	1	2	3	3						UPT BPOM

	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												
	4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		65	70	75	80	85					UPT BPOM
	RO 1 : Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1					UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												
	5.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		90	91	92	93	94					UPT BPOM

		yang diselesaikan sesuai standar												
	RO 1 : Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													
	6.1	Indeks Pelayanan Publik UPT		3,75	3,85	3,9	3,95	4						UPT BPOM
	RO 1 : Keputusan/Sertifikasi Layanan Oublik yang Diselesaikan oleh UPT			1	14	15	17	19						UPT BPOM
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal													
	7.1	Nilai AKIP UPT BPOM		76,55	77	77,55	78	78,55						UPT BPOM
	7.2	Niai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						UPT BPOM
	7.3	Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM		2.66	2.7	2.72	2.76	2.8						UPT BPOM
	7.4	Presentase Implementasi		100	100	100	100	100						UPT BPOM

		Rencana Aksi Reformasi Birokrasi												
	RO 1 ; Laporan koordinasi pengawasi Obat dan Makanan		1	1	1	1	1							UPT BPOM
	RO 2 : Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		6	6	6	6	6							UPT BPOM
	RO 3 : Perangkat pengolah data dan komunikasi		7	7	7	7	7							UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								2.203.747	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.150.000		
	RO 4 : Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		1	1	1	1	1							UPT BPOM
	RO 5 : Layanan Perkantoran Cat: Mendukung Sk "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1							UPT BPOM